

PARTISIPASI POLITIK ETNIS TIONGHOA DI INDONESIA

Andhika Pratama

Universitas Padjadjaran Bandung, Jl. Dago Pakar Timur Bandung
dhikanoman@gmail.com

Abstrak

Untuk melihat dan mengukur seberapa jauh partisipasi politik etnis Tionghoa sebagai kaum minoritas di Indonesia dapat dilihat dari partai-partai politik di mana mereka bergabung dan terlibat. Semangat etnis Tionghoa untuk dapat berperan serta dalam pemerintahan di Indonesia lewat partisipasinya dalam partai-partai politik mengalami sebuah dinamika. Kesempatan untuk ikut politik terbuka secara bebas pada era-era tertentu namun ada pada saatnya mereka mengalami kekerasan-kekerasan serta larangan dari masyarakat luas yang anti-China, misalnya pasca G30S/PKI, saat demonstrasi akibat krisis moneter yang mengakhiri orde baru berlangsung menjelang reformasi

Kata Kunci: *partisipasi, masyarakat sipil, pemilu, politik*

Abstract

To see and measure how far the political participation of Chinese ethnic minorities in Indonesia can be seen from the political parties in which they join and get involved. The spirit of Chinese people to be able to participate in government in Indonesia through participation in political parties suffered a dynamics. The opportunity to participate freely in the open political eras but there are certain at the time they are experiencing violence from the wider community as well as a ban on anti-China, for example, after the G30S / PKI, during a demonstration due to the financial crisis which put an end to the new order took place before the reform.

Keyword: *participation, civil society, election, politics*

China merupakan negara yang memiliki jumlah penduduk terbesar se-dunia. Warga keturunan China dengan etnis Tionghoa tersebar di seluruh negara, termasuk di Indonesia. Orang-orang China sudah ada di Indonesia sejak jaman kolonial Belanda di awal abad 19. Keberadaan mereka yang menjadi kaum minoritas di tanah air terkadang diperlakukan tidak adil dan didiskriminasi oleh kaum asli atau kaum yang lebih mayoritas.

Pada awalnya keturunan China yang tinggal di Indonesia, menolak disebut sebagai etnis, namun lebih memilih untuk disebut sebagai orang-orang China yang tinggal di luar negeri (*overseas*

Chinese). Kiprah etnis Tionghoa dalam perpolitikan Indonesia telah terlihat sejak Indonesia merintis kemerdekaan. Pada masa awal berkembangnya beragam partai di Indonesia, etnis Tionghoa pun telah aktif menjadi representasi dari beberapa partai yang beberapa diantaranya diangkat sebagai menteri. Namun di zaman Orde Baru etnis Tionghoa tidak diberikan kebebasan untuk menyalurkan aspirasinya lewat partai politik.

Kebangkitan demokrasi pasca runtuhnya rezim Soeharto pada 1998 meluapkan kembali semangat etnis Tionghoa dalam berpolitik. Menjelang Pemilihan Umum 1999, setidaknya terdapat

tiga buah partai dari etnis Tionghoa. Partai Pembauran Indonesia (Parpindo), Partai Reformasi Tionghoa Indonesia (Parti) dan Partai Bhinneka Tunggal Ika (PBI) meski hanya PBI yang lolos verifikasi Departemen Hukum dan HAM dan mampu menempatkan satu orang di kursi DPR.

Pada Pemilihan Umum 2004, tidak satu pun partai politik berbasis etnis Tionghoa yang berhasil lolos persyaratan Departemen Hukum dan HAM maupun verifikasi faktual KPU. Beberapa pendiri partai tersebut bergabung menjadi kandidat dari partai lain yang berhak menjadi peserta Pemilu. Lebih dari dua ratus caleg etnis Tionghoa menjadi peserta pemilu namun tidak satu pun yang berhasil menjadi anggota DPD. Partai politik berlandaskan etnis yang digiatkan oleh warga negara Indonesia keturunan China di Indonesia dianggap kurang prospektif.

Masalah etnis merupakan hal yang sensitif karena bersinggungan dengan nilai SARA (suku, agama, ras dan antar golongan). Melarang berdirinya partai politik yang berlandaskan etnis dianggap sebagai sebuah pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) karena membatasi hak warga negara dalam menyalurkan aspirasinya. Namun, membentuk partai politik atas dasar etnis dianggap sebagai suatu tindakan yang memecah belah persatuan.

Pada Pemilu 2009, etnis Tionghoa mulai menyadari hal tersebut dan lebih memilih bergabung dalam partai-partai yang sudah ada, mulai dari partai lokal, partai

dengan ideologi nasionalis hingga partai berlandaskan agama. Hal tersebut didukung adanya Undang-Undang Kewarganegaraan No. 12 Tahun 2006 yang menyebutkan bahwa etnis Tionghoa merupakan warga negara Indonesia dan dapat mendaftar menjadi calon dari partai politik. UU tersebut menjadi payung hukum, jaminan bagi etnis Tionghoa untuk dapat aktif dalam kegiatan politik tanpa perlu membentuk sebuah 'partai khusus' yang mewakili kepentingan etnisnya di pemerintahan.

Partisipasi etnis Tionghoa dalam partai politik di Indonesia sejak masa kolonial hingga era reformasi mengalami sebuah dinamika, Sehingga analisis tentang bagaimana partisipasi etnis Tionghoa dalam partai politik di Indonesia sejak masa kolonial hingga era reformasi penting untuk didiskusikan kembali. Kajian tersebut akan memberikan analisis tentang partisipasi etnis Tionghoa di Indonesia.

Masyarakat Majemuk dalam Sistem Sosial-Politik

Ciri khusus dari sebuah sistem ialah kaitan hubungan antara bagian-bagian atau komponen-komponen kedalam suatu kesatuan. Masyarakat dikatakan sebagai sebuah sistem karena terdiri atas bagian/komponen yang saling berhubungan. Bagian/komponen etnis, suku, agama, partai, golongan, dll dalam masyarakat Indonesia saling berhubungan dan membentuk sistem sosial.

Dua komponen dalam sistem sosial masyarakat Indonesia yang

dibahas dalam makalah, yakni 'etnis' dan 'partai politik' merujuk pada keragaman kelompok masyarakat dan merupakan cirri khas masyarakat majemuk (*plural society*). Robushka dan Shepsle (1972) menggambarkan tiga karakteristik masyarakat majemuk: adanya keragaman kultural; berkembangnya aliansi etnis; dan pengorganisasian yang dilakukan secara politik.¹

Keragaman kultural masyarakat Indonesia nyata terlihat dari banyaknya etnis dengan aneka budaya. Keberadaan etnis Tionghoa dengan perbedaan tata perilaku, kebiasaan dan pola pikir dibanding etnis-etnis lain yang ada di Indonesia (etnis Melayu, etnis Sunda, etnis Bugis, etnis Dayak, etnis Ambon, dll) dapat menjadi contoh. Perbedaan etnis yang satu dengan etnis yang lainnya menciptakan keadaan dimana tiap jenis etnis merasa lebih nyaman berinteraksi dengan sesama etnisnya sehingga berkembang aliansi etnis. Aliansi etnis banyak bentuknya, mulai dari organisasi perkumpulan etnis tertentu, hingga suatu partai dengan dominasi sebuah etnis. Maka, politik etnis menjadi ciri khas masyarakat majemuk, dimana persaingan politik pada umumnya ditandai dengan politik etnis.

Organisasi politik yang dibentuk oleh suatu kelompok etnik mengikuti dasar preferensi dan loyalitas etnis dalam komunitas. Etnisitas dijadikan dasar utama bagi alokasi nilai yang otoritatif.²

¹ Rabushka, Alvin. 1972. *Politics in Plural Societies*. Stanford University. hlm 27.

² *Ibid.*

Proses menonjolkan suatu etnis tertentu dalam sebuah organisasi politik disebut saliansi etnis. Sejak masa kolonial, telah terdapat partai politik yang diinisiasi oleh orang-orang etnis Tionghoa dengan mengedepankan kepentingan etnisnya. Pada masa Hindia-Belanda, kemajemukan masyarakat Indonesia dimaknai sebagai masyarakat yang terdiri atas dua atau lebih elemen yang hidup sendiri-sendiri tanpa ada pembauran satu sama lain di dalam kesatuan politik.³

Keberadaan partai politik sendiri merupakan unsur lain dalam masyarakat majemuk. Partai, yang dalam bahasa Inggris disebut *Party*, mengandung kata 'part' yang berarti bagian. Makna tersebut menyatakan bahwa partai ialah wadah partisipasi politik atas sebagian kelompok masyarakat.

Raymond Garfield Gettel dalam *Political Science* mendefinisikan partai politik sebagai:

"Sekelompok warga negara yang sedikit banyak terorganisir, yang bertindak sebagai suatu kesatuan dan yang dengan memakai kekuasaan memilih bertujuan mengawasi pemerintahan dan melaksanakan kebijaksanaan umum mereka" ("*A political party consists of citizens, more or less organized, who act as political unit and who, by the use of their voting power, aim to control the governmental and carry out their general policies*").⁴

Kata-kata 'sekelompok masyarakat' dalam definisi diatas menunjukkan bahwa suatu partai mewakili aspirasi bagian tertentu dari masyarakat. Banyaknya

³ Furnivall, J.S. 1967. *Netherlands India: A Study of Plural Economy*, Cambridge at The University Press. hlm 446-469

⁴ Gani, Soelistyati Ismail, 1987. *Pengantar Ilmu Politik*. Balai Aksara. Jakarta. hlm 112.

partai dalam suatu negara menyiratkan kemajemukan komposisi masyarakatnya.

Etnis dan partai politik merupakan representasi suatu kelompok sosial dalam masyarakat majemuk. Dari masa ke masa, sebuah kelompok sosial mengalami perkembangan dan fluktuasi sesuai dengan pola pemerintahan yang dijalankan. Itulah yang disebut dinamika. Dalam suatu sistem sosial terjadi interaksi dan interdependensi dengan sistem politik yang berlaku, yang berlangsung secara dinamis. Hal ini terjadi karena sistem politik mengalokasikan nilai-nilai yang berlangsung dalam sistem sosial di masyarakat, sebagaimana definisi sistem politik yang dikemukakan David Easton:

“Seperangkat interaksi yang diabstraksikan dari totalitas kelakuan sosial, dimana nilai-nilai dialokasikan terhadap masyarakat” (“*a set of interaction abstracted from the totality of social behavior, through which values are allocated for a society*”).⁵

Definisi tersebut menunjukkan bahwa terdapat keterkaitan antara sistem sosial yang ada dengan sistem politik yang berlaku. Partisipasi etnis Tionghoa dalam partai politik di Indonesia sejak masa kolonial hingga era reformasi mengalami dinamika. Sistem sosial yang dibangun etnis Tionghoa di Indonesia mengalami perubahan sesuai dengan sistem pemerintahan yang berlaku serta keadaan sosial masyarakat.

Partisipasi Etnis Tionghoa dalam Partai Politik di Indonesia pada Masa Kolonial

Pada masa kolonial Hindia-Belanda, orang-orang China ini memberikan sedikit pengaruh pada perjuangan rakyat Indonesia. Banyak yang menganggap bahwa mereka tidak peduli siapa yang memerintah, namun yang terpenting adalah mereka tetap dapat memperoleh keuntungan, karena itu mereka sering juga disebut sebagai oportunist.⁶ Pandangan tersebut masih berlaku hingga Indonesia merdeka. Loyalitas orang-orang keturunan China diragukan, terlebih lagi saat mereka masih mempunyai dua kewarganegaraan (China menganut *ius sanguinis* yang berarti seseorang adalah warga negara China selama ia lahir dari seorang warga negara China di manapun ia dilahirkan). Sedangkan Indonesia, berdasarkan hasil KMB, menganut *ius soli* yang berarti seseorang berkewarganegaraan Indonesia selama ia dilahirkan di Indonesia. Bahkan, setelah adanya nasionalisasi dimana mereka dapat memilih ingin menjadi warga negara apa, mereka terkadang tetap dipandang sebelah mata.

Pada masa memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, telah muncul partai-partai yang berisi orang-orang Tionghoa. Pada umumnya, partai-partai tersebut lebih memperjuangkan kepentingan etnisnya daripada kepentingan umum membela tanah air. Contohnya Chung Hwa Hui (CHH), yang mementingkan kepentingan domestik etnis Tionghoa. Partai ini beranggotakan para peranakan atau totok yang masih

⁵ Kantaprawira, Rusadi. 1980. *Sistem Politik Indonesia*. Penerbit Sinar Baru. Bandung. hlm 19.

⁶ Coppel, Charles A. 1983. *Indonesian Chinese in Crisis*. Oxford University Press. Singapura. hlm 25.

merasa terikat dengan China. CHH juga sering dikatakan sebagai partai penengah. Arah partai ini cenderung mengikuti kemana angin berhembus, ke arah mana yang dapat memberikan keuntungan dan melindungi kepentingannya.⁷ Mereka dapat bekerja sama dengan pemerintah kolonial dengan menerima status dari pemerintah Hindia-Belanda, mereka bekerja di pemerintahan, belajar bahasa Belanda, dan sebagainya. Semua itu dilakukan agar mereka mendapat tempat di *Volksraad*. Namun, sejak mereka kalah dalam pemilihan anggota *Volksraad* 1935 mereka mulai melirik untuk bekerja sama dengan partai nasionalis.⁸

Terdapat juga partai yang turut serta dalam perjuangan dan bekerja sama dengan partai nasionalis, yaitu Partai Tionghoa Indonesia (PTI). Partai ini lebih banyak berisi peranakan China yaitu campuran dari orang China dan Indonesia yang merasa sebagai orang Indonesia karena tinggal dan berinteraksi dengan masyarakat Indonesia asli. Mereka lebih berkecenderungan untuk menganggap dirinya sebagai orang Indonesia, yang sebagian besar mendapatkan darah Indonesia dari garis ibu, daripada merasa sebagai orang China. Rasa nasionalisme mereka sebagai orang Indonesia tertanam kuat. Mereka turut memperjuangkan kepentingan masyarakat asli namun tetap mengharapkan adanya kesetaraan hak, keistimewaan, dan tanggung jawab yang sama.⁹

⁷ Suryadinata, Leo (ed.). 1979. *Political Thinking of the Indonesian Chinese 1900-1977*. Singapore University Press. Singapura. hlm 59-61.

⁸ Coppel, *Indonesian Chinese...*, hlm. 33-34.

⁹ Suryadinata, *Political Thinking...*, hlm. 51-55.

Partai-partai lain seperti Partai Nasionalis Indonesia (PNI), menetapkan dalam peraturannya bahwa hanya orang-orang asli Indonesia yang dapat menjadi anggota penuh (pengurus) partai tersebut, dan orang Asia lainnya hanya dapat menjadi anggota saja. Partai

Indonesia Raya (Parindra) yang pada tahun 1930an menjadi partai yang paling berpengaruh di parlemen memutuskan untuk tidak menerima peranakan darimana pun, entah itu peranakan China, Eropa, Arab, atau India, untuk menjadi anggota. Kongres sendiri telah menyetujui *working paper* dari Thamrin yang menyatakan untuk mengeluarkan peranakan China meskipun ada orang-orang dari PTI yang sudah menganggap Indonesia sebagai tanah air mereka, karena mereka tetap ingin mempertahankan adat dan budaya mereka. Hal ini menyebabkan adanya keraguan atas loyalitas dan kewarganegaraan mereka untuk membela rakyat luas. Sedangkan partai yang berhaluan kiri, lebih mempertimbangkan untuk menerima orang Tionghoa, contohnya Gerindo pada tahun 1939.¹⁰

Partisipasi Etnis Tionghoa dalam Partai Politik di Indonesia pada Era Orde Lama

Pada era ini, masyarakat Tionghoa lebih banyak berperan pada bidang ekonomi namun keaktifan dalam bidang politik tidak dibatasi. Pada saat itu, banyak menteri yang merupakan keturunan etnis Tionghoa,

¹⁰ Mackie, J.A.C. (ed.). 1976. *The Chinese in Indonesia*. The Australian Institute of International Affairs. Australia. hlm 36-37.

seperti Dr. Lie Kiat Teng atau Mohammad Ali sebagai menteri kesehatan. Pada era ini pula, masyarakat Tionghoa dapat mengekspresikan kebudayaannya dengan bebas tanpa takut akan dikekang oleh pemerintah.¹¹

Tahun 1948, peranakan China yang secara politik berdekatan dengan Indonesia dan ingin menjadi orang Indonesia meskipun ia berasal dari etnis Tionghoa membentuk Persatuan Tionghoa (PT) yang pada 1950 berganti nama menjadi Persatuan Demokrasi Tionghoa Indonesia (PDTI). Mereka berharap dapat menjadi warga negara Indonesia namun tetap dapat mempertahankan budaya nenek moyang mereka. PT memposisikan diri di tengah-tengah kaum yang mendukung RIS dan kaum yang mendukung Indonesia sebagai Republik. PT bersedia bekerja sama dengan keduanya tanpa memihak ke salah satu. Dalam harian *Sinar* yang mereka terbitkan, mereka menekankan bahwa PT tidak menyetujui adanya kedikatoran dalam pemerintah dan penggunaan kekerasan. PT juga mendorong orang-orang Tionghoa agar berpartisipasi dalam dunia politik agar suara mereka sebagai kaum minoritas di Indonesia dapat di dengar sehingga kepentingan mereka pun tak ditindas oleh kelompok-kelompok lain.¹² Kenyataan yang terjadi banyak yang mengatakan bahwa PDTI ini lebih condong membantu Belanda daripada memperjuangkan kebebasan

Indonesia.

Pada 1954, PDTI berganti nama menjadi Baperki (Badan Permusyawaratan Kewarganegaraan Indonesia) yang pandangan politiknya cenderung memihak ke kiri. BAPERKI menganggap bahwa masalah kewarganegaraan merupakan masalah nasional karena itu harus diselesaikan oleh organisasi yang mempunyai pandangan nasional. Namun kenyataannya, Baperki menunjukkan diri sebagai pendukung Soekarno yang saat itu sedang gencar mempromosikan NASAKOM. Meskipun Baperki sempat menjadi salah satu peserta dalam Pemilu 1955 dan Pemilu regional 1957, namun Baperki dibentuk lebih sebagai organisasi daripada partai politik karena Baperki gencar mengajak masyarakat luas untuk bergabung. Selain itu, para pemimpin Baperki menyatakan bahwa anggota-anggota tidak diikat dan boleh berasal dari berbagai parpol lainnya.¹³ Meski demikian, Baperki merupakan organisasi Tionghoa terbesar yang memiliki anggota dari berbagai aliran politik, agama, dan pekerjaan. Walaupun begitu, sebagian besar anggota Baperki masih berasal dari etnis Tionghoa. Meskipun bukan parpol, namun Baperki berhasil menempatkan satu wakil dalam parlemen dan dua orang sebagai anggota Konstituante. Baperki sendiri selain aktif dalam politik juga masuk dalam bidang pendidikan dengan mendirikan beberapa sekolah untuk etnis Tionghoa. Perwakilan Baperki di parlemen juga berusaha untuk

¹¹ Suhandinata, Justian. 2009. *WNI Keturunan Tionghoa dalam Stabilitas Ekonomi dan Politik Indonesia*. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. hlm 311-312.

¹² Suryadinata, *Political Thinking...*, hlm 92-96.

¹³ Coppel, *Indonesian Chinese...*, hlm 43-44.

melindungi kepentingan warga negara China yang berada di Indonesia, misalnya dengan menentang peraturan mengenai larangan bagi pedagang China untuk berjualan di daerah pinggir kota, dan pada saat perdebatan mengenai perjanjian dwi kewarganegaraan antara China dan Indonesia.¹⁴ Baperki mendukung adanya sosialisme di Indonesia karena menganggap bahwa diskriminasi terhadap etnis Tionghoa tidak akan terhapus hanya dengan adanya asimilasi etnis Tionghoa dengan cara mengubah nama, menikah dengan orang asli atau juga dengan meninggalkan kelompok etnisnya dan melebur dengan masyarakat asli. Menurut mereka, masyarakat luas lah yang harus menghapuskan adanya diskriminasi tanpa perlu adanya asimiliasi karena itu hanya akan menghilangkan budaya asli.

Sedangkan para pendukung adanya asimilasi, membentuk Lembaga Pembina Kesatuan Bangsa (LPKB) untuk mengimbangi keberadaan Baperki. LPKB memiliki sifat yang tak jauh berbeda dengan Baperki, yakni berusaha mengumpulkan anggota dari luar etnis mereka. LPKB mempunyai anggota orang Indonesia asli yang merupakan rakyat biasa dan bahkan politisi sayap kanan. Dukungan Presiden Soekarno terhadap Baperki membuat LPKB berusaha untuk turut mencari dukungan dari pihak yang berkuasa. Usahanya berhasil ketika akhirnya, Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit yang menyatakan pembentukan LPKB¹⁵ sebagai bagian dari

institusi pemerintah. Walaupun demikian, LPKB tetap sulit untuk mengimbangi Baperki karena Baperki mendapat dukungan dari Presiden Soekarno meskipun LPKB mendapat dukungan dari militer. Baperki pun sempat menyerang LPKB, mengatakan bahwa kepemimpinan LPKB tidak sesuai dengan Nasakom karena tidak memiliki pemimpin yang beraliran komunis. Presiden Soekarno pun memperingatkan LPKB agar mengikuti Nasakom sehingga akhirnya LPKB mempunyai pemimpin sebagai perwakilan dari komunis walaupun sebelumnya LPKB memang sengaja berusaha untuk tidak menyertakan wakil berhaluan komunis.

Setelah terjadi pemberontakan G30S/PKI, setiap organisasi politik harus menyatakan posisinya. Baperki dan LPKB sebagai organisasi yang mayoritas berisi etnis Tionghoa, tidak mengeluarkan pernyataan apapun kepada media sampai kejadian itu telah seminggu berlalu. Kerusuhan anti-China dan anti komunis mulai merebak di segala penjuru. Sekolah-sekolah Baperki dibakar massa. LPKB dan organisasi lain meminta Presiden Soekarno untuk membubarkan PKI dan juga Baperki. Cabang-cabang Baperki mulai tutup. LPKB dan kekuatan militer bekerja sama untuk menghentikan segala kegiatan Baperki. Anggota-anggota Baperki pun ada yang ditangkap jika terbukti terlibat dalam kegiatan pemberontakan PKI tersebut.¹⁶

pemerintah menjadi Lembaga Pembinaan Kesatuan Bangsa karena adanya kesalahan dalam pembuatan draft yang terburu-buru dan dilakukan oleh anak muda non-China dan belum memiliki banyak pengalaman.

¹⁴ Mackie, *The Chinese in Indonesia*. hlm 45-60.

¹⁵ Kepanjangan LPKB setelah menjadi institusi

¹⁶ Mackie, *The Indonesian in Chinese*. hlm 56-63.

Partisipasi Etnis Tionghoa dalam Partai Politik di Indonesia pada Era Orde Baru

Pada tahun 1966 hingga 1969, ketika Soeharto melaksanakan tindakan-tindakan represif pasca G30S, di berbagai wilayah di Indonesia juga bermunculan kampanye-kampanye dan aksi-aksi anti-Tionghoa di berbagai daerah seperti Medan, Jakarta, Surabaya, Makassar dan Banjarmasin yang disertai dengan berbagai tindakan penjarahan, pengrusakan dan pembakaran rumah-rumah, toko-toko dan sekolah-sekolah. Tindakan-tindakan represif tersebut dilakukan karena sebagian besar masyarakat Indonesia percaya bahwa sumber komunisme yang berujung pada Gerakan 30 September 1965 adalah minoritas Tionghoa di Indonesia.¹⁷

Pada 2 April 1966, sekitar 20.000 etnis Tionghoa di Medan melakukan demonstrasi ke Konsulat RRC dengan tujuan memprotes siaran-siaran Radio Peking. Pada tanggal 15 April, di Lapangan Banteng, Jakarta berkumpul 50.000 orang Tionghoa untuk mendengarkan pidato dan sambutan tertulis Menteri Luar Negeri Adam Malik yang menyerukan agar orang-orang Tionghoa tetap memberikan bukti nyata atas kesetiaan mereka terhadap bangsa Indonesia, tidak hanya dibibir saja.¹⁸

Tindakan-tindakan yang cenderung mendiskriminasi etnis minoritas Tionghoa pada saat itu menyebabkan trauma yang luar biasa di kalangan etnis Tionghoa.

Masyarakat etnis Tionghoa diperlakukan secara diskriminatif. Ruang gerak mereka dibatasi, baik dalam bidang politik, sosial dan budaya. Diskriminasi politik dan budaya tampak pada peraturan penggantian nama dalam Keputusan Presidium Kabinet No. 127/U/Kep/12/1966, serta Inpres No. 14/1967 yang mengatur perayaan keagamaan/tradisi yang dibatasi hanya pada lingkungan sendiri (bukan tempat umum), diskriminasi juga tampak dalam praktek pengenaan Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia (SKBRI), pemberian kode khusus pada KTP yang berbeda, dan sebagainya. Bahkan, pemerintah kala itu membuat satu badan intelijen khusus yang bertugas mengawasi masalah Tionghoa, yaitu Badan Koordinasi Masalah Cina (BKMC).¹⁹ Dari penamaan badan tersebut, telah tampak suatu kesan bahwa keberadaan Tionghoa di Indonesia merupakan suatu masalah. Penyaluran aspirasi masyarakat etnik Tionghoa pada masa Orde Baru ini dapat dikatakan lebih buruk dibandingkan dengan masa orde lama dimana masyarakat etnis tionghoa masih dapat menyalurkan aspirasi politiknya, contohnya melalui Baperki dan LPKB.

Kebijakan pemerintah orde baru untuk melakukan fusi bagi partai-partai politik di Indonesia menjadi 3 partai, yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang bercorakan Islam, Partai Demokrasi Perjuangan (PDI) yang berhaluan Nasionalis dan satu Golongan Karya (GOLKAR),

¹⁹ "Partisipasi Sosial Politik dan Ekonomi Etnis Tionghoa di Era Reformasi" <http://www.inti.or.id/index.php?dir=news&file=detail&id=117>, diakses pada 8 Januari 2016 pukul 16:43.

¹⁷ Setiono, G Benny. 2008. *Tionghoa Dalam Pusaran Politik*. ELKASA. Jakarta. hlm 793.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 797.

tanpa adanya partai politik yang bercorakan etnis Tionghoa membuat masyarakat etnis Tionghoa kehilangan wadah untuk dapat mengaspirasikan suaranya di negeri. Hal tersebut diperparah dengan adanya tekanan yang sangat besar terhadap masyarakat Tionghoa sejak awal berkuasanya rezim Orde Baru yang membuat mereka enggan untuk turut berpartisipasi secara aktif di dalam dunia perpolitikan dengan menjadi kader-kader dalam partai politik dan lebih memilih untuk berkecimpung di dalam dunia bisnis dan ekonomi di Indonesia.

Pada masa Orde Baru etnis Tionghoa sangat sulit untuk mendapatkan kesempatan berpartisipasi dalam bidang politik terlebih masuk langsung ke dalam pemerintahan. Hal ini kemungkinan besar dikarenakan hubungan antara Indonesia dengan Cina yang buruk pada masa Orde Baru, terlebih akibat peristiwa G30S/PKI. Setelah adanya perbaikan hubungan diplomasi Indonesia-Cina pada tahun 1991, barulah peluang partisipasi etnis Tionghoa dalam bidang politik mulai muncul dengan terpilihnya Bob Hasan sebagai Menteri Perindustrian dan Perdagangan, walaupun secara keseluruhan peran politik etnis Tionghoa masih sangat terbatas saat itu.

Partisipasi Etnis Tionghoa dalam Partai Politik di Indonesia pada Era Awal Reformasi

Pemilu 1999

Krisis 1997 dan turunnya Presiden Soeharto dari pemerintahan pada 21 Mei 1998 telah mengakhiri rezim Orde Baru

yang telah berkuasa di Indonesia selama kurang lebih dari 32 tahun. Indonesia pun memasuki era baru yaitu Orde Reformasi, yang dalam teorinya mengedepankan pemerintahan yang benar-benar demokratis. Salah satu perubahan drastis yang terjadi pasca pergantian era Orde baru ke era Reformasi adalah sistem partai politik. Pada era Orde Baru jumlah partai politik dibatasi menjadi 2 buah partai dan 1 golongan karya. Sedangkan pada era Reformasi yang memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mendirikan suatu partai politik membuat jumlah partai politik meningkat tajam. Jumlah partai politik yang diajukan ke Departemen Kehakiman berjumlah sebanyak 141 partai,²⁰ walaupun dari kesekian partai tersebut, hanya 48 partai yang lolos seleksi dan diperbolehkan mengikuti pemilu tahun 1999, yang merupakan pemilu pertama yang diselenggarakan pada era Reformasi.

Pergantian rezim juga membawa perubahan dalam asas pendirian partai politik, dimana asas yang lama sebagaimana dinyatakan dalam UU No. 3 Tahun 1985 Tentang Partai Politik dan Golongan Karya yang menegaskan bahwa Pancasila menjadi satu-satunya asas bagi semua partai politik dan Golkar, sedangkan menurut peraturan yang direvisi yaitu UU No. 2 Tahun 1999 yang membebaskan suatu partai politik untuk menggunakan asas yang lain selain Pancasila, yang menyebabkan banyak partai yang berasas

²⁰ Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. hlm 450.

seperti nasionalisme, agama, termasuk keetnisan, yang bermunculan.²¹ Undang-undang ini juga memicu terbentuknya partai berasaskan etnis yang dibentuk oleh warga Indonesia keturunan Cina yang ber-etnis Tionghoa.

Keterlibatan etnis Tionghoa dalam pemilu 1999 masih belum maksimal. Hal ini merupakan adanya diskriminasi pada masa orde baru yang tidak memberikan kesempatan pada etnis Tionghoa untuk berkembang terutama dibidang politik. Situasi yang terjadi hampir 35 tahun ini menyebabkan etnis Tionghoa tidak terlibat secara intensif pada pemilu 1999. Namun, tetap ada kalangan etnis Tionghoa bahwa yang bertekad memperjuangkan aspirasinya. Kalangan tersebut meyakini bahwa etnis Tionghoa tidak dapat menggantungkan diri kepada partai-partai lain. Etnis Tionghoa harus mempunyai partai sendiri. Menjelang Pemilu 1999, terdapat 3 partai politik yang didirikan oleh sekelompok etnis Tionghoa, yaitu Partai Bhinneka Tunggal Ika Indonesia (PBI) di bawah pimpinan Nurdin Purnomo (pengusaha Travel dan Ketua Yayasan Hakka), Partai Reformasi Tionghoa Indonesia (PARTI) di bawah pimpinan Lieus Sungkharisma (bendahara KNPI) dan Partai Pembauran Indonesia di bawah pimpinan Jusuf Hamka (pengusaha HPH dan tokoh Bakom PKB).

Sayangnya, Partai Pembauran Indonesia ternyata tidak mendapatkan sambutan dan gugur sebelum berkembang. Partai Reformasi Tionghoa Indonesia

(PARTI) juga gagal dalam seleksi KPU sehingga tidak berpartisipasi dalam Pemilu 1999. Hanya PBI yang mampu lulus seleksi verifikasi dari Departemen Kehakiman dan HAM dan turut dalam Pemilu. Wakil PBI dari Kalimantan Barat, L.T. Susanto berhasil terpilih menjadi satu-satunya anggota DPR dari PBI.²² PBI mendapatkan tanggapan dan dukungan yang cukup besar dari masyarakat di Sumatera Utara, Riau dan Kalimantan Barat.

Diluar ketiga partai tersebut, masyarakat Tionghoa juga membaaur dengan partai-partai nasional lainnya. Contohnya Arwan Tjahjadi yang bergabung dengan partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) di Makassar dan berhasil menjadi anggota DPRD Makassar.²³ Tercatat juga ada total sekitar 150 calon legislatif yang berpartisipasi dalam pemilu tahun 1999.²⁴ Dari jumlah tersebut, lima orang berhasil mendapatkan kursi di DPR dan tujuh lainnya mendapatkan kedudukan di MPR. Warga Tionghoa yang mendapatkan kedudukan di DPR yaitu Kwik Kian Gie sebelum akhirnya diangkat menjadi menteri, Ir. Tjiandra Wijaya Wong dari PDI-P, Alvin Lie Ling Piao dari PAN, Ir Enggartiasto Lukita

²² IndonesiaMedia, Etnis Tionghoa dan Partai Politik, <http://www.indonesiamedia.com/2003/02/berta-0203-tionghoaparpol.htm>, diakses 9 Januari 2016 pukul 13.57.

²³ Kompasiana, Keran Reformasi Ubah Perilaku Politik Masyarakat Etnik Tionghoa, <http://sosbud.kompasiana.com/2010/04/12/keran-reformasi-ubah-perilaku-politik-masyarakat-etnik-tionghoa/>, diakses tanggal 8 Januari 2016 pukul 18.45.

²⁴ Jawa Pos, Kiprah Etnis Tionghoa di Jalur Politik Tanah Air, <http://www.jawapos.co.id/halaman/index.php?act=detail&nid=48845>, diakses tanggal 10 Januari pukul 09.32.

²¹ *Ibid*, hlm 452.

dari Golkar serta L.T. Susanto. Beberapa nama tersebut juga sekaligus merangkap sebagai anggota MPR, dengan tambahan yaitu Hartarti Murdaya (Chow Lie Ing) dari Walubi yang mewakili Utusan Golongan dan Daniel Budi Setiawan yang menjadi wakil Utusan Daerah Jawa Tengah dari PDI-P.

Dilihat dari jumlah masyarakat etnis Tionghoa di Indonesia yang walaupun cukup banyak tapi masih merupakan minoritas, partisipasi etnis Tionghoa dalam Pemilu 1999 dirasakan masih kurang. Dalam hal pembentukan partai politik misalnya, masih banyak masyarakat yang kurang setuju akan pembentukan partai yang berasaskan etnis, mengingat situasi politik saat itu yang masih labil dan dikhawatirkan bahwa pembentukan partai etnis akan memicu isu SARA dan kembali merusak hubungan antara etnis Tionghoa dengan masyarakat mayoritas lainnya yang baru saja pulih setelah sekian lama mendapatkan diskriminasi. Alasan lainnya adalah bahwa masyarakat Tionghoa walaupun tergabung dalam satu etnis, namun masyarakatnya sendiri cenderung heterogen dalam hal budaya serta agama. Alasan-alasan ini diperkuat terlihat dari kurangnya dukungan yang didapatkan partai etnis Tionghoa. Para calon legislatif yang masuk partai nasional lainnya dinilai lebih efektif dalam mencerminkan partisipasi warga tionghoa di Indonesia serta mendapatkan lebih banyak suara dan dukungan dari masyarakat.

Suara masyarakat Tionghoa yang cukup besar, yaitu sekitar 6-12 juta,

merupakan potensi dan suara yang besar bagi sebuah partai. Maka beberapa partai berlomba-lomba untuk mendapatkan simpati dari etnis Tionghoa dimana pemilu tahun 1999 lebih terbuka dan adil, tidak hanya dikuasai oleh satu partai saja. Beberapa partai besar seperti PAN, PDI-P, PKB dan Partai Golkar. Mereka menampilkan atraksi barongsai dan liang liong yang resminya masih dilarang pada masa itu untuk menarik simpati dari etnik Tionghoa. Selain itu dalam tahun baru imlek beberapa partai politik membentangkan spanduk yang bertuliskan *Gong Xi Fa Choi* di beberapa kota di Jawa, Sumatra dan Kalimantan.

Namun sebagian besar suara Tionghoa jatuh kepada PDI-P yang dipimpin oleh Megawati Soekarno Putri. Hal ini disebabkan oleh PDI-P merupakan partai alternatif dan partainya wong cilik sehingga kecil kemungkinan akan mengangkat isu etnis. Didalamnya kemungkinan ada jual beli politik, hal ini dibuktikan dengan diangkatnya Kwik Kian Gie sebagai menteri keuangan. Selain itu, ada juga alasan bahwa Megawati adalah putri Soekarno yang pada masa orde lama pernah dekat dengan Peking sehingga ada keinginan psikologis warga Tionghoa untuk bergabung dengan PDI-P.

Pemilu 2004

Salah satu hal yang cukup penting dalam pemilu 2004 adalah berlangsungnya Pemilu Langsung Umum Bebas dan Rahasia pertama yang terjadi di Indonesia pasca Orde Baru. Hal ini terbukti dengan keikutsertaan partai yang cukup banyak

Selain itu, cara pemilihan umum pun cukup berbeda dibandingkan pemilu-pemilu sebelumnya karena pada pemilu 2004 rakyat selaku “voters” tidak hanya memilih calon Presiden beserta Wakil tetapi juga memilih wakil rakyat di bidang legislatif.

Pemilu 2004 dilakukan dalam 2 tahap. Putaran pertama, pemilihan calon legislatif yang berasal dari 24 partai politik yang *qualified* sehingga memungkinkan untuk dipilih. Dilanjutkan putaran Kedua, pemilihan calon Presiden -Wakil Presiden. Pada saat itu, dikarenakan ada beberapa calon yang memiliki jumlah suara yang berdekatan dan belum mencapai 50 %, ²⁵ maka diadakan pemilu capres-cawapres putaran berikutnya yang menghasilkan Dr. Susilo Bambang Yudhoyono serta Muhammad Jusuf Kalla, SE selaku Presiden dan Wakil Presiden.

Pada tahap berikutnya diadakan Pemilihan Umum dalam pemilihan calon kepala daerah yang baru baik daerah tingkat I (Provinsi) maupun daerah tingkat II (Kabupaten). Hal ini sangat jarang terjadi karena pada pemilu-pemilu sebelumnya kebanyakan Kepala Daerah baik Gubernur maupun Bupati merupakan pensiunan ABRI. Untuk menghilangkan stigmatisme dari hal tersebut maka diadakan PILKADA (Pemilihan Kepala Daerah) dengan basis pemilu lokal yang JURDIL (jujur dan adil) sehingga diharapkan tidak ada kecurangan lagi karena para pemimpin daerah ini langsung dipilih oleh Rakyat .

Pada masa ini, fraksi TNI-POLRI di DPR dihilangkan karena apabila fraksi tersebut dibiarkan tetap ada maka dwifungsi ABRI dalam pemerintahan RI akan berlanjut dan akan sangat sulit bagi Republik ini untuk terus maju kedepan dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapinya terkait dengan Junta Militerisme yang sempat menguasai Indonesia selama 32 tahun dibawah kepemimpinan Jenderal Besar (Purnawirawan) H. M. Soeharto. Dengan penghapusan fraksi TNI-POLRI dalam pemilu 2004, isu dominasi militer dalam pemerintahan teratasi. Namun, problem gender dan ras, termasuk isu keterlibatan orang-orang tionghoa dalam pemilu masih belum terselesaikan.

Hal ini terjadi karena kaum Tionghoa yang pada umumnya berdagang maupun berwirausaha kurang tertarik dengan hal-hal politis karena mereka merasa politik tidak terlalu berpengaruh terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara mereka. Bagi mereka, membayar pajak dan membantu kesejahteraan bangsa dengan devisa-devisa ekonomi yang mereka berikan sudah cukup bagi untuk membuat mereka disebut sebagai seorang Warga Negara Republik Indonesia yang tunduk pada Pancasila. Mereka merasa tidak perlu bergabung dengan Angkatan Bersenjata atau menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk dapat melaksanakan tindakan Bela Negara bagi mereka.

Orang-orang Tionghoa umumnya membuat sebuah partai yang cukup berkelompok berdasarkan keyakinan

²⁵ Diambil dari <http://www.pemiluindonesia.com/sejarah/pemilu-2004.html> pada tanggal 8 Januari 2016 pukul 08.24 WIB.

mereka. Umumnya mereka bergabung dalam partai-partai agama seperti Partai Damai Sejahtera (PDS) yang kebanyakan Calon Legislatifnya merupakan orang-orang Tionghoa. Dalam partai tersebut, orang-orang etnis Tionghoa pada umumnya bertindak sebagai *frontier* sehingga sangat sulit untuk menemukan orang keturunan Tionghoa lainnya dalam partai-partai di Indonesia. Hal ini dikarenakan ikatan persaudaraan yang kuat antara sesama kaum Tionghoa. Etnis Tionghoa terbiasa untuk harus terus bersatu, seperti pada zaman orde baru dimana untuk beribadah saja mereka dilarang. Akibatnya, tumbuh kebencian yang cukup besar terhadap Pemerintahan Presiden Soeharto di masa orde baru dahulu.

Akan tetapi, tidak semua orang Tionghoa memiliki pandangan yang sama terhadap hal ini. Kwik Kian Gie, mantan Menko Ekuin di Kabinet Pembangunan Nasional pada era Megawati merupakan representasi etnis Tionghoa yang nasionalis. Sebelumnya menjadi menteri, beliau telah terkenal dengan kritiknya yang tajam sebagai salah satu staf ahli maupun kritikus harian *KOMPAS*, serta lewat keterlibatannya dalam Departemen Penelitian dan Pengembangan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).²⁶ Salah satu kritik yang paling jelas menampakkan nasionalisme dalam dirinya adalah dikala terjadi sengketa antara PT. Freeport dengan Pemerintah RI terkait *outsourcing* yang dilakukan dalam rangka efisiensi kepegawaian dan juga kebutuhan

tenaga ahli dalam mengelola pertambangan mereka di Papua. Kwik Kian Gie dengan keras mengecam PT. Freeport yang semenjak tahun 60-an sudah mengambil kekayaan alam Papua dan dibawa ke Amerika Serikat selaku *homebase* Freeport dengan menyisakan sedikit bagi Rakyat Indonesia apalagi rakyat Papua. Beliau mengancam mundur dari Kabinet Megawati apabila pengelolaan maupun pemeliharaan dan distribusi yang memadai di Papua tidak dilakukan oleh anak bangsa. Cara Kwik Kian Gie mengancam memang cukup naïf, namun, tersirat rasa cinta terhadap bangsa dan negara yang besar hingga membuat dirinya merasa bahwa bangsanya mampu bersaing dengan negara lain dalam era Globalisasi seperti saat ini.

Pemilu 2009

Dalam pemilu 2009, antusiasme masyarakat Tionghoa dalam pemilu semakin besar. Ada kenaikan jumlah caleg Tionghoa sampai 100% lebih dari Pemilu 2004 di daerah Jakarta (dari 100 caleg pada 2004 menjadi 213 caleg di pada 2009).²⁷ Banyak sekali baliho-baliho yang tersebar di seluruh nusantara yang menggambarkan pencalonan etnik Tionghoa, terutama di daerah Jakarta, Surabaya dan Kalimantan Barat. Keadaan politik yang kondusif membuat etnis Tionghoa tidak segan untuk melibatkan diri dalam ranah politik. Partisipasi etnis Tionghoa untuk menjadi pemilih pun meningkat, meski tidak dapat dipastikan

²⁶ Diambil dari <http://www.tokohindonesia.com/ensiklopedi/k/kwik-kian-gie/index.shtml> pada tanggal 8 Januari 2016 pukul 08:40.

²⁷ <http://www.ahmadheryawan.com/opini-media/sosial-politik/2806-etnik-tionghoa-dan-pemilu.html>. diakses tanggal 10 Januari 2016 pukul 20.00.

berapa jumlah warga Tionghoa yang ikut dalam pemilu legislatif ataupun berapa besar jumlah mereka yang berpartisipasi dalam pemilu 2009. Hal ini dikarenakan banyak dari mereka yang tidak lagi menunjukkan identitas tradisional mereka. Peningkatan-peningkatan partisipasi dari masa pemilu ke masa pemilu adalah fakta bahwa etnis Tionghoa peduli terhadap perpolitikan negara Indonesia.

Kebebasan bagi warga Tionghoa di masa ini lebih dapat tercapai dengan dikeluarkannya UU Kewarganegaraan No 12 Tahun 2006 yang disahkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 1 Agustus 2006. Undang-Undang Kewarganegaraan No. 12 Tahun 2006 menyebutkan bahwa etnis Tionghoa merupakan warga negara Indonesia dan dapat mendaftar menjadi calon dari partai politik. UU tersebut menjadi payung hukum, jaminan bagi etnis Tionghoa untuk dapat aktif dalam kegiatan politik tanpa perlu membentuk sebuah 'partai khusus' yang mewakili kepentingan etnisnya di pemerintahan.

Disamping itu, lahir pula UU Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnik (disahkan DPR pada 27 Oktober 2008). UU ini menjamin kebebasan etnis Tionghoa dalam berperan sebagai warna negara sekaligus jaminan bahwa sekat-sekat yang bersifat etnis dan ras kini sudah tidak lagi berlaku.

Banyak diantara etnis Tionghoa yang terjun langsung di beberapa partai seperti PDI-Perjuangan, Golkar, Demokrat, bahkan beberapa partai Islam seperti

Partai Keadilan Sejahtera. Sebelumnya, kebanyakan warga Tionghoa menjadi penyanggah dana, namun dalam pemilu 2009, para kaum muda mulai melihat bidang politik sebagai sebuah usaha baru dan peluang berkarir. Etnis Tionghoa semakin melebur ke masyarakat luas dan dapat dengan bebas menjalankan budaya serta hari raya, hal ini juga disambut baik oleh masyarakat Indonesia lainnya.

Etnis tionghoa sudah tidak terasingkan lagi dalam beberapa hal, meskipun terkadang masih ada orang-orang yang bersikap anti-China.

Simpulan

Keterlibatan etnis Tionghoa selama masa kolonial hingga orde lama menunjukkan adanya kesadaran berpolitik dalam etnis minoritas meskipun partai-partai yang dibentuk masih memperjuangkan kepentingan etnis dan anggotanya masih terbatas pada orang-orang etnis tersebut. Pada era ini, isu kewarganegaraan dan adanya diskriminasi masih menjadi fokus utama karena etnis Tionghoa saat itu belum melebur dalam masyarakat luas. Pada masa orde baru, peran serta etnis Tionghoa dalam partai politik dapat dikatakan lumpuh akibat tindakan diskriminatif yang dilakukan oleh pemerintah. Namun, sejak era reformasi, partisipasi mereka kian nyata dan mengalami perkembangan dari pemilu 1999, 2004 hingga 2009.

Partisipasi etnis Tionghoa dalam Partai Politik di Indonesia sejak Masa Kolonial hingga era Reformasi menunjukkan

bahwa sebuah sistem sosial mengalami dinamika sesuai dengan sistem politik yang berlaku. Pada tiap masa, sejak zaman kolonial hingga era reformasi, sistem politik yang berlaku memiliki perbedaan. Interaksi dan interdependensi etnis Tionghoa dalam

wadah partai politik sebagai bagian dari kemajemukan bangsa Indonesia tidak terlepas dari sistem pemerintahan yang berlaku serta keadaan sosial masyarakat yang terjadi kala itu.

Daftar Pustaka

- Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Coppel, Charles A. 1983. *Indonesian Chinese in Crisis*. Oxford University Press. Singapura.
- Furnivall, J. S. 1967. *Netherlands India: A Study of Plural Economy*. Cambridge at The University Press.
- Gani, Soelistyati Ismail. 1987. *Pengantar Ilmu Politik*. Balai Aksara. Jakarta.
- Kantaprawira, Rusadi. 1980. *Sistem Politik Indonesia*. Penerbit Sinar Baru. Bandung.
- Mackie, J.A.C. (ed.). 1976. *The Chinese in Indonesia*. The Australian Institute of International Affairs. Australia.
- Rabushka, Alvin. 1972. *Politics in Plural Societies*. Stanford University.
- Setiono, G Benny. 2008. *Tionghoa Dalam Pusaran Politik*. ELKASA. Jakarta.
- Suhandinata, SE, Dr.Ir.Justian. 2009. *WNI Keturunan Tionghoa dalam Stabilitas Ekonomi dan Politik Indonesia*. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Suryadinata, Leo (ed.). 1979. *Political Thinking of the Indonesian Chinese 1900-1977*. Singapore University Press. Singapura.
- _____. "Partisipasi Sosial Politik dan Ekonomi Etnis Tionghoa di Era Reformasi" Tersedia: <http://www.inti.or.id/index.php?dir=news&file=detail&id=117>, (diakses pada 8 Desember 2016 pukul 16:43).
- Indonesia-Media. "Etnis Tionghoa dan Partai Politik", Tersedia: <http://www.indonesiamedia.com/2003/02/berta-0203-tionghoaparpol.htm>, (diakses 9 Desember 2016 2016 pukul 13.57).
- Jawa Pos, "Kiprah Etnis Tionghoa di Jalur Politik Tanah Air", Tersedia: <http://www.jawapos.co.id/halaman/index.php?act=detail&nid=48845>, (diakses tanggal 10 Desember 2016 pukul 06.32).
- Kompasiana. "Keran Reformasi Ubah Perilaku Politik Masyarakat Etnik Tionghoa", Tersedia: <http://sosbud.kompasiana.com/2010/04/12/keran-reformasi-ubah-perilaku-politik-masyarakat-etnik-tionghoa/>, (diakses tanggal 8 Desember 2016 pukul 18.45).
- <http://www.pemiluindonesia.com/sejarah/pemilu-2004.html> (diakses pada

tanggal 8 Desember 2016 pukul 08.24 WIB).
<http://www.tokohindonesia.com/ensiklopedi/k/kwik-kian-gie/index.shtml> (diakses pada tanggal 8 Desember 2016 2016 pukul 08:40).

<http://www.ahmadheryawan.com/opini-media/sosial-politik/2806-etnik-tionghoa-dan-pemilu.html> (diakses tanggal 10 Desember 2016 2016 pukul 20.00).